

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peningkatan kebutuhan akan energi di Indonesia terus meningkat karena makin bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada saat ini pemakaian energi di Indonesia masih sangat bergantung kepada bahan bakar minyak (BBM). Dengan porsi pemakaian energi nasional dari BBM yang mencapai 54,4% di tahun 2006 (Ditjen Migas, 2006), Pemerintah Indonesia harus dapat menjamin ketersediaan BBM yang mencukupi dan tepat waktu serta dengan harga yang terjangkau yang merupakan tuntutan masyarakat pada umumnya.

Sektor transportasi masih tetap menjadi penyumbang nomor satu untuk pemakaian BBM nasional. Kemudian sektor rumah tangga merupakan penyumbang terbesar kedua pemakaian BBM nasional disusul oleh sektor industri dan pembangkit listrik. Dengan status Indonesia saat ini yang merupakan net importir minyak, maka Pemerintah Indonesia harus selalu dapat menjaga stabilitas energi nasional dengan cara melakukan impor minyak mentah dari luar negeri.

Pemerintah dalam kondisi saat ini belum memiliki suatu acuan kebijakan yang mengatur pemanfaatan minyak bumi dan pendistribusiannya. Hal ini merupakan permasalahan utama yang perlu segera mendapatkan solusinya mengingat cadangan minyak bumi di Indonesia yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia untuk melakukan stabilitas energi nasional adalah dengan memberikan prioritas utama pada penyediaan dan distribusi BBM. Hal ini karena saat ini Indonesia hanya memiliki 7 (tujuh) unit pengolahan minyak dengan kemampuan produksi yang sangat terbatas. Saat ini kemampuan kapasitas pengolahan minyak bumi di Indonesia sebesar 1.057 barel per hari dimana produksi BBM yang dihasilkan

hanya sekitar 720 barel per hari sehingga tidak mencukupi kebutuhan BBM di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 1.000 barel per hari. Diharapkan dengan dibuatnya suatu pedoman pemanfaatan minyak bumi dan pendistribusian BBM maka kestabilan energi nasional dapat tercapai.

Namun, permasalahan kembali timbul ketika harga minyak dunia terus mengalami peningkatan sehingga akan menyebabkan semakin tingginya harga BBM di dalam negeri. Semakin tingginya harga BBM di dalam negeri akan menyebabkan makin tinggi pula subsidi yang diberikan oleh Pemerintah karena sampai saat ini BBM di Indonesia masih disubsidi melalui subsidi harga. Subsidi harga yang dimaksud adalah dimana harga jual BBM lebih rendah dari harga pokoknya sehingga berarti setiap orang yang membeli BBM mendapatkan penggantian selisih antara harga pokok BBM dan harga jualnya.

Adapun kebijaksanaan pemberian subsidi minyak berawal dari tahun anggaran 1977/1978. Sebenarnya program pemberian subsidi minyak pada saat itu ditujukan untuk menjaga kestabilan harga minyak yang dianggap sebagai komoditas strategis agar stabilitas perekonomian nasional dapat terjaga. Namun dalam kenyataannya subsidi minyak ini ternyata menimbulkan permasalahan tersendiri. Masyarakat Indonesia terbawa dalam perilaku konsumtif dan boros dalam penggunaan BBM dan alokasi subsidi tersebut ternyata dalam prakteknya lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi sehingga kurang dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah yang merupakan target utama pemberian subsidi tersebut.

Masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah pun terbawa pada sebuah situasi psikologis yang terlanjur nyaman dengan kondisi saat ini (*status quo*) yang memiliki ketergantungan yang tinggi dengan penggunaan BBM khususnya minyak tanah yang mendapat porsi subsidi yang besar dari Pemerintah. Keinginan untuk mengubah penggunaan minyak tanah dengan sumber energi lainnya akan mendapatkan tantangan dari para penggunanya sendiri yang tidak ingin mengubah pola yang selama ini dilakukan dengan segala kemudahan bagi para penggunanya.

Porsi subsidi minyak tanah yang diberikan oleh Pemerintah mencapai Rp36,35 triliun pada tahun 2006 (Ditjen Migas, 2006). Karena besarnya subsidi yang diberikan untuk minyak tanah tersebut maka Pemerintah menargetkan untuk

menghapus subsidi minyak tanah secara bertahap dan menggantikannya dengan pemberian subsidi pada sumber energi lainnya yaitu gas bumi.

Alasan yang mendasar dari rencana substitusi minyak tanah dengan gas bumi adalah karena produksi minyak Indonesia yang terus turun dan harga minyak bumi yang saat ini sudah mendekati level USD 130 per barrel sedangkan pada sisi permintaan energi terus terjadi kenaikan konsumsi energi dalam negeri tiap tahunnya. Dampak lingkungan juga merupakan salah satu faktor lain yang melatarbelakangi substitusi bahan bakar minyak dengan bahan bakar gas yang dianggap lebih ramah lingkungan.

Kondisi kenaikan produksi gas bumi yang telah mencapai 3,1 TSCF dengan total cadangannya yang mencapai 188,34 TSCF (PGN, 2006) di Indonesia membuat gas bumi menjadi alternatif utama untuk program substitusi energi. Diharapkan dengan pelaksanaan program substitusi energi tersebut kedepannya kebutuhan energi Indonesia dapat ditutupi dari produksi gas bumi dalam negeri sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan kegiatan impor minyak bumi.

Dalam usaha melakukan substitusi bahan bakar minyak dengan bahan bakar gas, salah satu jenis bahan bakar gas yang dapat digunakan sebagai pengganti minyak tanah untuk sektor rumah tangga adalah *Liquefied Petroleum Gas* (LPG).

Program substitusi minyak tanah dengan LPG untuk sektor rumah tangga tersebut memerlukan usaha yang serius dari Pemerintah yang mencakup masalah sosialisasi substitusi LPG terhadap minyak tanah, masalah pelaksanaan program substitusi LPG terhadap minyak tanah, masalah peraturan dan kebijakan Pemerintah, serta masalah jaringan moda distribusi, penyalur dan agen LPG.

Adanya analisis kondisi umum dan tinjauan wilayah di masing-masing kota atau provinsi mutlak diperlukan agar program substitusi nasional ini dapat berjalan dengan baik sehingga program utama Pemerintah untuk menghapuskan subsidi BBM dengan pemanfaatan gas bumi tepatnya dengan moda distribusi LPG dapat segera terealisasi.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Dalam pelaksanaan program substitusi energi nasional, pertanyaan mendasar yang munculkan adalah bagaimana bentuk pelaksanaan pembangunan jaringan moda distribusi LPG dalam rangka implementasi program substitusi energi nasional. Perlu dirincikan pula setiap kegiatan rantai suplainya serta pembahasan atas permasalahan mengenai bagaimana nilai keekonomiannya dari setiap kegiatan rantai suplai distribusi LPG nasional.

Selain dari pada permasalahan tersebut, timbul pula pertanyaan mengenai peluang usaha apa yang dapat dimanfaatkan dengan adanya program substitusi energi nasional tersebut. Penjabaran pemecahan dari permasalahan tersebut juga harus dapat menjawab persoalan mengenai seberapa besar resiko finansial dari setiap aspek yang mempengaruhi peluang usaha tersebut.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah didapatkannya hasil analisis pembangunan jaringan moda distribusi LPG yang mencakup analisis kondisi umum dan tinjauan wilayah, respon masyarakat dan peranan pemerintah dalam upaya substitusi BBM nasional di sektor rumah tangga. Tujuan lain adalah diperolehnya keekonomian nilai rantai di dalam sistem distribusi tersebut sehingga perbandingan subsidi LPG dengan minyak tanah dapat diperoleh. Selain itu didapatkan pula peluang usaha pendukung dari adanya program substitusi energi nasional dengan penggunaan LPG tersebut.

1.4 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan di dalam rantai suplai dan pola distribusi LPG serta usaha-usaha peralihan penggunaan LPG yang terencana dalam rangka implementasi program substitusi LPG sebagai pengganti minyak tanah bagi pemenuhan kebutuhan energi nasional pada umumnya.

Adapun secara terperinci, ruang lingkup penelitian dalam penulisan thesis ini adalah:

1. gas bumi yang akan dipakai dan dijadikan sebagai pokok pembahasan untuk alternatif substitusi minyak tanah adalah LPG;

2. pokok pembahasan moda transportasi LPG ditekankan pada konsumen sektor rumah tangga di wilayah Kabupaten Bekasi;
3. data yang digunakan dalam komponen perhitungan dalam penulisan thesis ini adalah data real yang valid pada tahun 2006 – 2007;
4. studi dan analisis mengenai kondisi umum dan tinjauan wilayah, pengolahan data survei pembangunan jaringan moda distribusi LPG di Kabupaten Bekasi serta studi mengenai kebutuhan dan keseimbangan pasokan LPG mengacu kepada laporan wilayah regional Jawa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada bulan Desember 2006;
5. perhitungan keekonomian pengembangan pemanfaatan LPG berdasarkan pada perhitungan nilai keekonomian dari setiap kegiatan rantai suplai distribusi LPG Pertamina nasional untuk mendapatkan perbandingan total subsidi nasional untuk minyak tanah dan LPG;
6. pokok pembahasan peluang usaha bagi swasta dititikberatkan kepada peluang usaha pengangkutan LPG melalui transportasi LPG *trucking* dalam upaya memenuhi kebutuhan produksi dan untuk mendukung kinerja SPPBE di wilayah Bekasi; dan
7. penentuan kelayakan ekonomi dan sensitivitas peluang usaha transportasi LPG *trucking* didasarkan pada indikator ekonomi.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan thesis ini terdiri atas enam bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang pola distribusi gas LPG untuk konsumen sektor rumah tangga, perumusan masalah, ruang lingkup dan obyek penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat tentang produk-produk bahan bakar minyak, cadangan dan sistem distribusi gas bumi, konsep dan teori yang berasal dari buku-buku rujukan antara lain konsep dasar manajemen

logistik dan rantai suplai, konsep biaya, teori keekonomian dan penetapan harga / tarif.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat tentang tahap-tahap yang akan dilakukan dalam upaya substitusi minyak tanah dengan LPG dan metode penelitian yang dipakai dalam penulisan thesis ini serta penjelasan singkat mengenai tahapan-tahapan di dalam metode penelitian tersebut.

BAB IV PEMBANGUNAN JARINGAN MODA DISTRIBUSI LPG NASIONAL

Bab ini memuat tentang moda distribusi LPG nasional yang mencakup analisis kondisi umum dan tinjauan wilayah, analisis respon masyarakat mengenai program substitusi, peranan pemerintah, nilai keekonomian rantai suplai distribusi LPG nasional dan perbandingan subsidi minyak tanah dengan LPG.

BAB V PERHITUNGAN KEEKONOMIAN TRANSPORTASI SPPBE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang perhitungan estimasi biaya untuk mendapatkan indikator kelayakan ekonomi secara keseluruhan untuk usaha transportasi SPPBE dan memuat hasil analisa sensitivitas.

BAB VI KESIMPULAN